



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
JALAN SIMPURUSIANG NO. 27 MASAMBA, PROV.SUL-SEL
TELP. (0473) 21003 FAX. (0473) 21003**



RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas Berkat Rahmat, Taupiq dan Hidayah-Nya jualah sehingga Rencana Kerja (RENJA) Dinas Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2019 dapat selesai.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM adalah merupakan dokumen perencanaan yang disusun untuk periode 2019, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan aspirasi masyarakat yang terinventarisir melalui musrenbang yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Renja-P Tahun 2019 merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu Utara yang mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan RENSTRA Periode Tahun 2016-2021.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih terdapat kekurangan, olehnya itu kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pihak yang terkait selalu kami harapkan untuk kesempurnaan laporan ini dimasa akan datang. Dan semoga laporan ini berguna bagi pihak yang membutuhkan khususnya bagi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu Utara. Terima kasih.

Masamba, Juli 2019
KEPALA DINAS,



Drs. H. MUH. KASRUM, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 197002151992021002

**TIM VERIFIKASI RENCANA KERJA (RENJA)PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019 KABUPATEN LUWU UTARA**

NAMA SKPD : DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM (DP2KUKM)

TANGGAL :

NO	NAMA	NIP	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1	Ir. RUSYDI RASYID, M.Si	19630705 199703 1 005	KETUA	1.
2	Dr.H.AGUNAWAN,SKM,M.Si	19720411 199203 1 004	SEKRETARIS	2.
3	MUHAMMAD KHALIS, ST, M.Si	19770209 200312 1 008	ANGGOTA	3.
4	SYAIFUL AMIR, S.Pt, MP	19760602 200604 1 014	ANGGOTA	4.
5	OVAN PATUANG PUTRA, ST,M.Si	19841027 200901 1 006	ANGGOTA	5.
6	MUH. KEMAL TAMSIR, S.STP,M.Si	19810630 199912 1 002	ANGGOTA	6.
7	ABD. HALIM LATIEF, ST	19770131 201101 1 001	ANGGOTA	7.
8	Ir. AGUSSALIM, DM	19700817 200701 1 053	ANGGOTA	8.
9	IIN FAUZI FRIDA, S.Si	19781101 200801 2 009	ANGGOTA	9.
10	NURDIN, SE	19750418 200901 1 001	ANGGOTA	10.
11	BASRUN, SP	19800618 199903 1 001	ANGGOTA	11.
12	DEWI MURNI, SE	19690207 200701 2 010	ANGGOTA	12.
13	MURNI, SE	19800927 200502 2 004	ANGGOTA	13.
14	ILMAN YAKIN, A.Md, KoM	19800910 200312 1 004	ANGGOTA	14.

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
5. Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 181) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Dearah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 229);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 215);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 66).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019;
- KEDUA** : Rencana Kerja Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu ditetapkan oleh Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu Utara sebagai Pedoman Rencana Kerja Perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu Utara;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal Agustus 2019

KEPALA DINAS,



Drs. H. MUH. KASRUM, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Dinas Koperindag Kab.Luwu Utara.....	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas	19
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas P2KUKM	25
2.4. Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD	30
2.5. Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	38
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	42
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	42
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas P2KUKM.....	44
3.3. Program dan Kegiatan	65
BAB IV PENUTUP.....	77
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-P SKPD TAHUN LALU	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-P dan Capaian Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM.....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	6
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM.....	6
2.4. Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD	6
2.5. Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	6
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	7
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	7
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja-P Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM.....	7
3.3. Program dan Kegiatan	7
BAB IV PENUTUP.....	77
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Dinas Koperindag dan Pencapaian Renstra Dinas Koperindag s/d THN 2017 Kabupaten Luwu Utara	9
Tabel 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu Utara	23
Tabel 3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Kabupaten Luwu Utara	32
Tabel 4. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018 Kabupaten Luwu Utara	39
Tabel 5. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018 dan Perkiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Luwu Utara	67

BAB. I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terwujudnya Rencana Kerja Satuan Pemerintah Daerah (SKPD) merupakan prasyarat bagi setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah untuk memudahkan pengimplementasian dari penyusunan rencana strategis pada kurun waktu tertentu. Dalam rangka itu diperlukan penerapan system perencanaan yang matang, jelas dan realistis, sehingga pelaksanaan program kerja masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Daerah dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, efektif, efisien baik dari sisi penganggaran maupun sasaran tiap-tiap program kegiatan.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan Dinas P2KUKM Kabupaten Luwu Utara untuk periode 2019, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan antara lain aspirasi masyarakat yang terinventarisir oleh Dinas , melalui musrembang dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Renja-P Perubahan Dinas P2KUKM merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas P2KUKM Kabupaten Luwu Utara.

Ruang lingkup Rencana Kerja adalah pelaksanaan kegiatan Dinas P2KUKM dalam 1(satu) tahun dengan memperhitungkan faktor-faktor penentu keberhasilan yang dicapai, RENJA-P Dinas P2KUKM Kabupaten Luwu Utara mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 dan RENSTRA Dinas P2KUKM Kabupaten Luwu Utara 2016-2021

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM , maka perlu penyusunan Rencana KerjaPerubahan ,hal ini dimaksudkan sebagai kerangka perencanaan dan penganggaran tahunan, yaitu sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan.



1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja SKPD dilandasi Dasar Hukum sebagai berikut :

- (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 104, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4421);
- (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5587);
- (4) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
- (6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4725);
- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4578);
- (8) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4737);
- (9) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;



Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019

- (10) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- (11) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4585);
- (12) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4664);
- (13) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- (14) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- (15) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- (16) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- (17) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (18) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- (20) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2031;



Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019

- (21) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005-2025;
- (22) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010-2015;
- (23) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 14);
- (24) Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 96 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 96);
- (25) Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nomor 29).

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dibuatnya Renja Perubahan SKPD Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM adalah merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Olehnya itu Renja Perubahan SKPD Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD



2. Tujuan
 1. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah;
 2. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan
 3. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan instansi dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan Pemerintah Daerah.
 4. Memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama 1 tahun kedepan.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perubahan SKPD Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB. I PENDAHULUAN

Bab ini berisi :

- 1.1. Latar Belakang : Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perubahan SKPD, proses penyusunan Renja Perubahan SKPD

BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-P DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-P Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja-P Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM tahun lalu (Tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun n-1) pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja-P



Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM sudah disahkan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM.

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM.

Bab ini berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kab. Luwu Utara, telaahan terhadap Visi, Misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan terhadap Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan, dan penentuan Isu-isu Strategis;

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai

1. Membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam Bab ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan berdasarkan hasil



pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang.

BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Bab ini memuat Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja-P Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM.

Bab ini memuat tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD-P, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB. IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.



BAB. II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-P SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-P Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM.

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja-P Evaluasi pelaksanaan Renja-P Dinas P2KUKM tahun lalu (Tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), yang mengacu pada APBD Tahun 2017 dan target Tahun 2018. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas P2KUKM berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja-P Dinas P2KUKM tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan Tabel 1. Hasil evaluasi Capaian kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM berdasarkan Pengukuran indikator kinerja Progran out come dan kegiatan tahun 2018 sebesar 98,59 %,sedangkan capaian sedangkan Capaian Renstra outcome hingga tahun 2017 sebesar 80,12 % dengan kategori capaian sangat tinggi. Dalam mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja, Dinas P2KUKM mendapatkan alokasi dana APBD-P untuk tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 7.204.252.450,- (Tujuh Miliar Dua Ratus Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah) yang telah direalisasikan sebesar Rp. 6.865.977.772,- (Enam Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah). Berdasarkan Hasil evaluasi kegiatan yang diusulkan pada tahun 2018 tidak semua kegiatan bisa dilaksanakan karena keterbatasan anggaran APBD olehnya itu kegiatan yang bisa dilaksanakan adalah kegiatan skala prioritas saja yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, mengurangi ketimpangan kesenjangan sosial, mengurangi angka kemiskinan, dan peningkatan lapangan kerja.



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM belum memiliki SPM yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI, Kementerian Perindustrian RI, dan Kementerian Perdagangan RI, sehingga menjadi kendala bagi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM dalam menentukan capaian kinerja pelayanan. Untuk itu dalam penentuan capaian kinerja yang digunakan hanya mengacu pada IKU/IKK.

Berdasarkan Tabel. 2, indikator fungsi pelayanan berdasarkan RPJMD 2016 – 2021 terdapat 4 sasaran dengan 8 indikator. Sasaran dan indikator tersebut merupakan penjabaran dari Misi Keempat RPJMD.

Sasaran Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil ada 2 indikator yaitu : Persentase Koperasi yang sehat dan Persentase usaha mikro yang mengalami peningkatan Skala Usaha. Indikator Persentase Koperasi yang sehat kondisi awal tahun 2015 adalah sebesar 4.3 % dan hingga tahun 2016 meningkat menjadi 4,48 % terjadi peningkatan koperasi sehat sebesar 0,18 %. Tahun 2017 naik menjadi 4,63 %, Sedangkan realisasi capaian tahun 2018 sebesar 5,41 % Terjadi kenaikan sebesar 0,78% dari tahun 2017. Hal ini disebabkan karena terkendala dengan Permenkop No: 10/Per/M.UKM/IX/2015 tentang kelembagaan koperasi. Dalam pasal 45 ayat 1 menyebutkan Menteri mendelegasikan pengesahan akta pendirian, perubahan AD, penggabungan, peleburan pembagian dan pembubaran koperasi kepada Deputy Bidang Kelembagaan, sedangkan pada ayat 2 menegaskan bahwa pengesahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan dengan sistem elektronik (sisminbhkop). Oleh karena itu setelah adanya permen tersebut pengurus Koperasi mengalami kendala dalam hal pengurusan BH koperasi sehingga ada beberapa koperasi yang terbentuk tahun 2017 dan tahun 2018 belum berbadan hukum dan belum bisa dicatat dalam buku register koperasi sebelum berbadan hukum dan belum dianggap sebagai koperasi aktif. Meskipun demikian animo masyarakat untuk berkoperasi sangat tinggi karena adanya perhatian Pemerintah pusat berupa reward terhadap koperasi yang aktif dan berprestasi berupa bantuan penambahan modal dan kemudahan dalam pengajuan kredit modal usaha. Pembinaan yang cukup aktif dilakukan oleh dinas terkait dalam hal ini dinas



Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019

P2KUKM selaku Pembina Koperasi di daerah berupa penyuluhan dalam rangka penyampaian syarat wajib sebagai koperasi aktif yaitu wajib untuk melakukan RAT setiap tahun. Selain itu juga dilakukan berbagai pelatihan terhadap pengelola Koperasi dalam rangka peningkatan SDM pengelola koperasi. Indikator Persentase usaha mikro yang mengalami peningkatan Skala Usaha kondisi awal tahun 2015 sebesar 0,18 % hingga tahun 2016 meningkat menjadi 0,20 % terjadi kenaikan sebesar 0,02 % dan hingga tahun 2018 terus meningkat menjadi 0,46 %. hal ini disebabkan karena terus meningkatnya pelaku usaha Usaha mikro dan kecil meskipun juga ada beberapa yang sudah gulung tikar karena kekurangan modal dan tidak mampu bersaing dengan Usaha mikro kecil lainnya. Berdasarkan hasil pemantauan dan pendataan Bidang Koperasi dan UKM tahun 2017 mengalami peningkatan skala usaha dari mikro naik kelas menjadi kecil yang berarti terjadi kenaikan omzet dari pelaku Usaha mikro. Peningkatan ini seiring dengan adanya kebijakan pemerintah dengan memberikan kemudahan fasilitas kredit KUR dengan bunga yang sangat rendah dengan tanpa jaminan, dan Kebijakan pemerintah tentang kemudahan pemasaran produk UMKM melalui retail modern dan pasar online.

Program Pendukung :

1. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil menengah.
2. Penyediaan Sarana Pemasaran Produk UMKM
3. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif koperasi dan UKM.
4. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Sasaran meningkatnya Meningkatkan Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan terdiri dari 3 indikator yaitu : 1). Pertumbuhan Nilai Transaksi Perdagangan 2). Persentase Kontribusi Sub Sektor Perdagangan Terhadap PDRB 3). Persentase Pasar Dalam Kondisi Baik. Pertumbuhan Nilai Transaksi Perdagangan kondisi awal tahun 2015 sebesar 1.72 % sedangkan tahun 2016 naik menjadi 1,75 % terjadi kenaikan sebesar 0,03 %. Untuk tahun 2017 pertumbuhan nilai transaksi perdagangan sebesar 2,52 % terjadi kenaikan sebesar 0,77 % dari tahun 2016. Pertumbuhan nilai transaksi perdagangan hingga tahun 2018 mencapai 2,76 % terjadi kenaikan sebesar 0,24 %. Peningkatan ini diakibatkan karena jumlah usaha perdagangan dikabupaten Luwu Utara meningkat seiring dengan masuk retail modern dan swalayan mini dikabupaten luwu utara, selain itu juga dipengaruhi meningkatnya nilai hasil pertanian, industri



Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019

pengolahan dan jasa perdagangan lainnya sehingga nilai volume perdagangan juga meningkat. Proyeksi target hingga tahun 2019 mencapai 3 %. Persentase Kontribusi Sub Sektor Perdagangan Terhadap PDRB kondisi awal tahun 2015 mencapai 8,9 % hingga tahun 2016 naik menjadi 9,31 % terjadi kenaikan 0,41 %. tahun 2018 mencapai 9,32 %. Ekspor antar daerah atas dasar harga berlaku tahun 2018 mencapai Rp. 152.200.000,- hal ini mengakibatkan pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan menjadi 29,11 % dan distribusi PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 1,22 %. Tingginya ekspor antar daerah membuat komponen net ekspor total mengalami pertumbuhan dalam struktur pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Utara berdasarkan harga konstan. Ini didorong ekspor antar daerah yang tinggi sejalan dengan pertumbuhan industri pengolahan untuk pasar domestik. Persentase Pasar Dalam Kondisi Baik tahun 2016 sebesar 3 % hingga tahun 2018 naik signifikan mencapai 10,30 % hal ini disebabkan oleh program pemerintah melakukan revitalisasi pasar secara besar-besaran diseluruh Indonesia termasuk Kabupaten Luwu Utara dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat. Jumlah pasar yang dibangun tahun 2016 sebanyak 2 pasar yaitu pasar Sukamaju dan pasar Amassangan Kecamatan Malangke Barat yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Sedang tahun 2017 Jumlah pasar tradisional yang dibangun sebanyak 3 unit, yaitu Pasar Bone-Bone, Pasar Mulyerejo, Pasar Sabbang hingga tahun 2018 jumlah pasar tradisional yang dibangun sebanyak 5 unit.

Program Pendukung :

1. Program Pengembangan Sarana Perdagangan Dalam Negeri
2. Program Pengembangan Pemasaran Produk dan Komoditi Unggulan
3. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Sasaran Meningkatkan Perlindungan Terhadap Hak/Kepentingan Konsumen dan Tertib Ukur hanya memiliki satu indikator pengukuran yaitu Persentase Peningkatan Perlindungan Konsumen. Persentase Peningkatan Perlindungan Konsumen kondisi awal tahun 2015 sebesar 75,35 % hingga tahun 2017 mencapai 80,18 % , hingga tahun 2018 naik mencapai 80,59 %. Hal ini disebabkan karena mendorong pelaku usaha agar meningkatkan kepedulian dalam ketertiban serta kepatuhan untuk selalu menjaga kepercayaan konsumen terhadap kepastian alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang digunakan dalam transaksi perdagangan



Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019

sesuai dengan ukuran yang seharusnya. Selain itu Pemerintah daerah melalui dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM terus secara rutin melakukan pengawasan barang bersubsidi, pengawasan dan pemusnahan barang-barang kadaluarsa atau exfire.

Sasaran Meningkatkan Daya Saing dan Produktifitas Industri Kecil Menengah memiliki 2 indikator yaitu : 1. Pertumbuhan industri kecil menengah, 2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB. Pertumbuhan industri di Kabupaten Luwu Utara tahun 2017 7,8 % hingga tahun 2018 mencapai 11,33%. Untuk tahun 2017 pertumbuhan industri mengalami penurunan sebesar 3,35 % (hanya mencapai 7,8 % dari target 11,15 %). Penurunan ini disebabkan karena adanya alih fungsi industri dari komoditi nelam yang pada tahun 2016 pertumbuhannya sangat signifikan menurun karena banyak IKM yang bergerak dibidang pengolahan nelam gulung tikar akibat anjloknya harga nelam. Hal ini memicu pertumbuhan industri melemah/lambat . Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB tahun 2018 sebesar 4,48 %. Industri pengolahan sebagai penyumbang terbesar dalam peningkatan PDRB disektor industri. Hal ini disebabkan karena hampir setiap tahun industri terus bertambah dan berkembang. Berdasarkan data BPS tahun 2016 PDRB disektor industri pengolahan menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2017 adalah sebesar Rp. 619.453.870 sedangkan tahun 2015 hanya mencapai Rp. 419.453.870,-, terjadi kenaikan sebesar Rp. 200.000.000,-

Program Pendukung :

1. Program Kapasitas IPTEK Sistem Produksi
2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
3. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
4. Program Penataan Struktur Industri



2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi dan UKM.

Dalam pelaksanaan tugas sebagai salah satu Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM yang memberikan pelayanan serta pembinaan langsung kepada masyarakat maka dapat diketahui dan diidentifikasi beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM :

1. Bidang Koperasi dan UKM :

Masalah utama yang dihadapi bidang Koperasi dan UKM adalah :

- A. Masih Kurangnya pengetahuan Aparat dalam Pembinaan Koperasi dan UMKM. Hal ini menyebabkan sulitnya menilai atau mendiagnosa sehat tidaknya koperasi dan UMKM untuk menentukan seberapa besar perkembangan dan kemajuan koperasi dan UMKM tersebut. Penyebabnya adalah terbatasnya anggaran untuk melatih SDM aparat pembina koperasi.
- B. Masih rendahnya SDM Pengurus dan Pengelola Koperasi. Penyebabnya adalah rendahnya kesadaran pengurus dan pengelola koperasi untuk mengikutsertakan pengurusnya dalam pelatihan pengelolaan dan Manajemen koperasi.
- C. Belum adanya koperasi unggulan disetiap Kecamatan hal ini disebabkan karena koperasi yang ada dikabupaten luwu utara belum memenuhi kriteria koperasi unggulan yang dipersyaratkan utamanya dari segi kesehatan koperasi. Olehnya itu diperlukan pembinaan dan pemantauan terhadap kesehatan koperasi secara berkelanjutan.
- D. Belum maksimalnya peralatan dan Permodalan bagi UMKM, hal ini disebabkan karena sulitnya UMKM untuk mengakses permodalan karena Lembaga/Bank pemberi pinjaman masih mempersyaratkan agunan yang kadang belum sepenuhnya UMKM miliki. Selain itu para pelaku usaha (UMKM) masih selalu berharap bantuan modal hibah dari pemerintah yang terbatas.



Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019

- E. Kurangnya Pembinaan terhadap UMKM potensial, penyebabnya adalah produksi UMKM masih terbatas dan tidak kontinu sehingga sulit untuk memasarkannya karena belum bisa memenuhi permintaan pasar.
 - F. Tidak Tersedianya Data UMKM yang akurat, Penyebabnya adalah mobilitas UMKM yang ada di Kabupaten Luwu Utara sangat tinggi karena sering berpindah-pindah tempat usaha dari suatu daerah ke daerah lain yang mereka anggap lebih memberikan banyak keuntungan sehingga data yang diperoleh terputus pada setiap tahunnya.
 - G. Kurangnya produk UMKM yang memiliki standar pasar, Penyebabnya adalah masih rendahnya pengetahuan UMKM tentang peningkatan kualitas produk yang memenuhi standar pasar utamanya dalam hal kemasan.
 - H. Kurangnya Sarana dan Prasarana Pemasaran Bagi Produk UMKM. Penyebabnya adalah sulitnya pembebasan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana pemasaran termasuk pembangunan rest area pemasaran produk UMKM.
 - I. Rendahnya keinginan masyarakat untuk cinta produk lokal. Penyebabnya adalah kualitas produk lokal kalah bersaing dengan produk dari luar disamping kualitasnya juga harganya lebih terjangkau oleh masyarakat.
 - J. Belum adanya regulasi tentang layanan umum permodalan terhadap UMKM dan perusahaan daerah. Penyebabnya karena dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang baru terjadi perubahan banyak kewenangan dalam pembuatan regulasi tentang layanan umum.
2. Bidang Perdagangan
- A. Terbatasnya Pelaku Usaha yang berorientasi ekspor dan memiliki kemampuan mengakses informasi pasar.
 - B. Belum optimalnya penataan dan Pengelolaan Pasar Tradisional.
 - C. Kondisi sarana dan prasarana penunjang perdagangan belum memadai untuk mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa.
 - D. Belum adanya regulasi tentang Penataan Pedagang kaki lima dan asongan.
 - E. Belum maksimalnya penataan dan pembinaan pedagang



Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019

- F. Masih terbatasnya sarana dan prasarana perdagangan di kecamatan
 - G. Masih terbatasnya kendaraan operasional
 - H. Belum maksimalnya pemasaran produk dan komoditi unggulan.
 - I. Masih terbatasnya sarana dan prasarana resi gudang
3. Bidang Perlindungan Konsumen dan Kemetrolgian
- Masih Kurangnya Pengetahuan SDM Aparat Pengawasan Barang dan Jasa.
 - Belum Optimalnya Lembaga Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar.
 - Kurangnya tingkat kesadaran produsen dan konsumen tentang tertib niaga dan perlindungan konsumen.
 - Masih adanya produk yang beredar di pasaran yang belum memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - Belum terbentuknya UPTD Kemetrolgian sehingga belum bisa dilakukan tera dan tera ulang sebagai sumber PAD.
 - Belum adanya kantor UPTD kemetrolgian sebagai tempat penyimpanan peralatan tera.
4. Bidang Perindustrian
- A. Masih rendahnya kualitas Sumber daya terampil dibidang industri
 - B. Masih rendahnya Pertumbuhan Wirausaha Baru di Bidang Perindustrian.
 - C. Kurangnya Sarana dan Prasarana Dibidang Perindustrian.
 - D. Masih Kurangnya Peralatan yang Memadai bagi Para Pelaku Usaha Industri.
 - E. Masih kurangnya produk - produk IKM yang berciri khas lokal.
 - F. Masih Rendah kualitas produk IKM.
 - G. Masih terbatasnya produk IKM berstandarisasi
 - H. Perlunya pemutakhiran Data Potensi Industri yang Akurat setiap tahun.
 - I. Belum adanya industri pariwisata (Kampung Komoditi Unggulan)
 - J. Belum maksimalnya kerjasama pelaku industri dengan pihak swasta
 - K. Perlunya Pembinaan Bagi Industri Rumah Tangga secara berkesinambungan



L. Perlunya Kawasan Pengembangan industri tahun tempe di Kecamatan Bone-Bone dan Kecamatan Sukamaju.

M. Perlunya kawasan pusat perbelanjaan Meubel

N. Pengembangan Industri Kapurung Instant sebagai produk unggulan daerah

Dari beberapa permasalahan yang dihadapi pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu Utara maka dapat dilihat dari Isu-Isu Strategis, saat ini Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM kabupaten Luwu Utara melaksanakan 4 bidang kewenangan yaitu: Bidang Perdagangan, Bidang Perindustrian, Bidang Koperasi dan UKM, Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang.

Untuk memperoleh informasi tentang apa saja yang menjadi isu strategis yang akan ditangani melalui renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kab.Luwu Utara di gunakan analisis SWOT.

Analisis lingkungan internal Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu Utara memperhatikan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan dan analisis lingkungan eksternal memperhatikan unsur-unsur peluang dan ancaman sebagai berikut :

a. Kekuatan (*Strength*)

1. Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda No 10 Tahun 2008 tanggal 22 Juli 2008 Tentang struktur organisasi dan tata kerja Dinas Koperindag Kabupaten Luwu Utara.
2. Adanya komitmen pimpinan yang tegas, konsisten dan didukung oleh seluruh staf.
3. Sumber Daya Manusia Relatif Mengetahui Kondisi Daerah.
4. Kerjasama dengan pihak legislatif yang baik.
5. Tersedianya Dana/ Anggaran Pembangunan.

b. Kelemahan (*Weakness*)

1. Data potensi daerah beragam dan belum akurat/memadai
2. Belum maksimalnya penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) perencanaan pembangunan, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan.



Pencana Kerja Perubahan Tahun 2019

3. Jumlah dan Kemampuan staf relatif kurang.
4. Pengawasan dan Pemanfaatan teknologi informasi yang relatif kurang.
5. Kerjasama dengan pihak luar relatif masih kurang

c. Peluang (*Opportunities*)

1. Kebijakan dan kewenangan dalam pembinaan Dinas P2KUKM
2. Kebijakan Otonomi Daerah
3. Potensi Sumber Daya Alam yang cukup besar
4. Jumlah Koperasi dan UKM cukup Banyak
5. Adanya dukungan Masyarakat luas terhadap program-program Dinas P2KUKM.

d. Tantangan (*Threats*)

1. Kondisi Sosial ekonomi masyarakat masih rendah dan tidak stabil
2. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan koperasi masih rendah.
3. Sarana Pemasaran terhadap Produk UMKM masih Kurang.
4. Keterbatasan Modal Berusaha terhadap Pelaku Ekonomi masih kecil.



2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD dimulai dengan mengacu kepada Issu Pembangunan yang tertuang dalam Visi Misi Kabupaten Luwu Utara dan Visi Misi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM yakni :

1. Meningkatkan Industri kreatif yang berdaya saing tinggi
2. Meningkatkan kualitas Koperasi sebagai penopang perekonomian masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia bagi pengelola Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
4. Meningkatkan sarana Infrastruktur pengembangan kawasan industri
5. Fasilitasi pengembangan modal usaha bagi UMKM
6. Pengembangan Industri Kecil Menengah dalam rangka peningkatan ekonomi kerakyatan
7. Meningkatkan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
8. Meningkatkan nilai transaksi perdagangan dan net ekspor antar daerah.
9. Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan dan sektor industri terhadap PDRB.

Jumlah Program/kegiatan yang direview sesuai dengan target renstra dan RPJMD adalah sebanyak 11 program dengan 25 kegiatan dengan 5 bidang yaitu : Bidang Sekretariat, Bidang Koperasi dan UKM, Bidang Perindustrian, Bidang Perdagangan, dan Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang . Review ini bertujuan memudahkan dalam melakukan evaluasi capaian target setiap tahunnya sehingga program dan kegiatan yang dilakukan dapat terukur dan dapat menjadi penilaian terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah dalam hal ini Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM. Langkah-langkah yang dilakukan adalah : (1.) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program, (2.) Evaluasi pencapaian prioritas program berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM tahun-tahun sebelumnya, (3.) Membuat



Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019

rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja program Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM dan pencapaian visi dan misi Bupati, (4.) Mengidentifikasi kebijakan yang diperlukan.

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2019 Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu Utara dapat dilihat jelas pada Tabel. 3 berikut



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program kegiatan yang dijabarkan lewat penganggaran Kegiatan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu Utara merupakan aspiratif dan keinginan masyarakat yang dituangkan dalam musrenbang ditambah dengan top down dari dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM sendiri yang diperoleh dari potensi daerah yang digabungkan dan kemudian memverifikasi semua yang diusulkan dengan jalan melakukan perangkingan dengan mempertimbangkan skala prioritas karena keterbatasan anggaran. Dari hasil perangkingan itulah yang selanjutnya diusulkan untuk masuk pada penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) berdasarkan Tupoksi dan Visi Misi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM. Hasil evaluasi Musrenbang yang telah dilakukan di 12 Kecamatan berdasarkan usulan pemangku kepentingan maka ada 5 program dan 6 kegiatan pendukungnya yaitu :

1. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
Kegiatan : a. Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah
2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Kegiatan : a. Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya
3. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Kegiatan : Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
4. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Kegiatan : a. Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk
b. Pengembangan fasilitasi dan sarana distribusi perdagangan
5. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Kegiatan : a. Pembinaan kemampuan teknologi industry

Daftar usulan pemangku kepentingan berdasarkan hasil Musrenbang Kabupaten dapat terlihat pada tabel 4 berikut :



**BAB. III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Ada 9 program menuju Perubahan untuk Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian yaitu :

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan Negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritime.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan public pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan.
4. Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program “ Indonesia Pintar “, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program “ Indonesia Kerja “ dan “ Indonesia Sejahtera “ dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestic.



8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air, semangat bela Negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.
9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

3.1.1 Telaahan Visi, Misi dan Platform Perubahan

Amanat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 :

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, keadilan sosial dan perdamaian abadi.

Visi Pembangunan Indonesia adalah **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”**

Visi tersebut mengandung makna bahwa :

Berdaulat adalah Setiap Bangsa berhak menentukan nasib sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi bangsa

Mandiri adalah Bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

Gotong Royong adalah Intisari dari Ideologi Pancasila 1 Juni 1945, bahwa tanggungjawab membangun bangsa adalah dengan cara musyawarah dalam memutuskan dan gotong royong dalam kerja.



Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut akan ditempuh melalui Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritime, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan Negara Hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi dan UKM

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Luwu Utara yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang dirumuskan berdasarkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021.

3.2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Mewujudkan Misi Kesatu

Tujuan Misi 1

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam basis kehidupan yang religious
2. Meningkatkan partisipasi lembaga adat dalam pelaksanaan pembangunan



Tujuan 1

Sasaran :

3. Terimplementasi kannya prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta patuh pada supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan
4. Meningkatnya penghayatan, pengamalan dan peran agama dalam penyelenggaraan pembangunan

Tujuan 2

Sasaran :

1. Meningkatnya partisipasi dan peran lembaga/komunitas adat dalam pembangunan

Tujuan Misi 2

Tujuan 1

Meningkatkan pelayanan kesehatan dan kondisi hidup sehat masyarakat.

Sasaran :

Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan serta penerapan pola hidup sehat dalam masyarakat

Tujuan 2

Meningkatkan kualitas pemukiman serta pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat kurang mampu

Sasaran :

Terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni dan pemukiman bersanitasi baik

Tujuan Misi 3

Tujuan 1

Meningkatkan derajat pendidikan dan kemampuan literasi masyarakat

Sasaran :

Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan literasi masyarakat



Tujuan 2

Mendorong prestasi kepemudaan dan peran perempuan dalam pembangunan

Sasaran :

1. Meningkatnya prestasi kepemudaan dan keolahragaan
2. Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak dalam pembangunan

Tujuan 3

Meningkatkan apresiasi, revitalisasi dan pelestarian keragaman dan kekayaan budaya

Sasaran :

Meningkatnya ruang apresiasi keragaman budaya dan kekayaan budaya

Tujuan Misi 4

Tujuan 1

Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor-sektor perekonomian serta pengembangan potensi pusat-pusat pertumbuhan wilayah

Sasaran :

1. Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan
2. Meningkatnya produksi dan produktivitas koperasi dan UMKM
3. Berkembangnya kawasan ekonomi dan industry kreatif cepat tumbuh
4. Meningkatnya nilai perdagangan barang dan jasa

Tujuan 2

Mengembangkan iklim investasi yang baik bagi pemodal asing dan dalam negeri untuk tumbuhnya industri agro dan non agro serta perdagangan dan jasa.

Sasaran :

Meningkatnya daya saing investasi dari PMDN dan PMA

Tujuan 3



Mengembangkan potensi pariwisata menjadi destinasi dan daya tarik wisata yang representatif

Sasaran :

Meningkatnya daya tarik dan daya saing pariwisata

Tujuan Misi 5

Tujuan

Memelihara keseimbangan antara pemanfaatan dan perlindungan lingkungan untuk keberlanjutan daya dukung lingkungan

Sasaran :

Terpeliharanya daya dukung, daya tampung dan keseimbangan lingkungan dalam penyelenggaraan pembangunan

Tujuan Misi 6

Tujuan 1

Mengurangi ketimpangan pendapatan antar lapisan masyarakat pada tatanan perkotaan, pedesaan, pegunungan, dataran rendah dan pesisir pantai serta kesenjangan kemajuan antar kecamatan

Sasaran :

1. Tertanggulangnya kemiskinan pada masyarakat lapisan bawah di area pesisir/ pantai, dataran rendah, pegunungan, pedesaan dan perkotaan
2. Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan produktivitas masyarakat

Tujuan 2

Menyediakan dan meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana wilayah dari pinggiran daerah dengan memperkuat desa-desa hingga ke per-kota.

Sasaran :

1. Terpenuhinya kebutuhan jalan dan jembatan dalam interkoneksi wilayah antar desa dan dari desa ke kota
2. Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana perhubungan dalam mendukung pergerakan barang dan jasa
3. Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana energi dalam mendukung kebutuhan rumah tangga dan perkembangan industri



Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019

4. Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana sumberdaya air dalam mendukung kebutuhan rumah tangga dan industri
5. Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana komunikasi dalam mendukung kebutuhan masyarakat

Tujuan Misi 7

Tujuan

Memelihara rasa aman dan melindungi masyarakat dari kerentanan atas bencana dan Perlindungan Konsumen

Sasaran :

1. Menurunnya gangguan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat
2. Menurunnya jumlah pemakai narkoba
3. Meningkatnya perlindungan kepada masyarakat dari kerentanan atas bencana dan perlindungan konsumen

Dalam upaya pencapaian visi tersebut, berdasarkan identifikasi permasalahan dalam pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Luwu Utara terdapat beberapa Faktor-faktor penghambat dan pendorong dalam pelaksanaan Tupoksi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdapat beberapa **faktor penghambat** dan **pendorong** pencapaian kinerja yang mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati terpilih yaitu:

1. Faktor-Faktor Penghambat:
 - a. Internal
 1. Belum optimalnya sumber daya aparat yang kompeten dalam meningkatkan kualitas kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
 2. Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
 - b. Eksternal



Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019

1. Belum adanya Standar Pelayanan Minimum (SPM) perencanaan pembangunan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan perencanaan.
 2. Lemahnya koordinasi antar kabupaten/kota, Provinsi dan Pusat
 3. Terbatasnya alokasi anggaran.
 4. Rendahnya kualitas SDM pengelola Koperasi
 5. Rendahnya kualitas SDM pengelola UKM dan IKM
2. Faktor-Faktor Pendorong:
- a. Internal
 1. Tingginya motivasi kerja aparatur.
 2. Adanya komitmen pimpinan dan konsistensi yang didukung oleh seluruh staf
 3. Adanya iklim kerja yang kondusif
 4. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
 5. Adanya peraturan pemerintah yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
 - b. Eksternal
 1. Adanya dukungan peran sektor informal
 2. Tingginya koordinasi antar kelompok usaha, Koperasi, dan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam mendukung ketersediaan data sebagai bahan perencanaan dan pelaporan
 3. Adanya kesempatan bagi UKM, IKM dan staf mengikuti diklat teknis.



C. Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI, Kementerian Perindustrian RI, Kementerian Perdagangan RI, Renstra Dinas Koperasi dan UKM Proppinsi Sulawesi Selatan serta Dinas Perindag Propinsi Sulawesi Selatan

1. Renstra Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Tahun 2015 - 2019

Mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 09/M/2005 Tanggal 31 Januari 2015 bahwa kedudukan Kementerian Koperasi dan UKM adalah unsur pelaksana pemerintah dengan tugas membantu Presiden untuk mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan Koperasi dan UKM di Indonesia. Sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya Kementerian Koperasi dan UKM telah menetapkan visi, yaitu:

“Menjadi Lembaga Pemerintah yang kredibel dan efektif untuk mrndinamisasi pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam rangka meningkatkan produktivitas, daya saing dan kemandirian “

Misi Kementerian Koperasi dan UKM adalah : Memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan nasional melalui perumusan kebijakan nasional; pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kebijakan pemberdayaan di Bidang Koperasi dan UMKM; serta peningkatan sinergi peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam rangka meningkatkan produktivitas, daya saing dan kemandirian Koperasi dan UMKM secara sistimatis , berkelanjutan dan terintegrasi secara nasional. Untuk mencapai visi tersebut diatas terdapat Beberapa faktor penghambat dan pendotong dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan ditinjau dari sasaran jangka menengah renstra kementerian Koperasi dan UKM

Faktor-Faktor Penghambat:

1. Kurangnya Koordinas dalam perancangan
2. Rendahnya kualitas SDM pengelolah UKM dan Koperasi
3. Terbatasnya permodalan koperasi



Faktor-Faktor Pendorong:

1. Adanya motivasi kerja aparatur.
2. Adanya konsisten dan komitmen pimpinan.
3. Adanya Peraturan sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
4. Adanya kesempatan bagi Pengelolah UKM dan Koperasi mengikuti diklat teknis.
5. Adanya koordinasi dan kerjasama antara daerah dan provinsi.

2. Telaahan Renstra Kementerian Perindustrian Republik Indonesia Tahun 2015-2019

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industry sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada Pemerintah untuk mendorong kemajuan industry nasional secara terencana.

Visi Pembangunan Industri Nasional adalah “ *Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh* “.

Industri Tangguh bercirikan :

1. Struktur industry nasional yang kuat, dalam, sehat dan berkeadilan;
2. Industri yang berdaya saing tinggi ditingkat global;
3. Industri yang berbasis inovasi dan teknologi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri nasional mengemban misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran industry nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. Memperkuat dan memperdalam struktur industry nasional;
3. Meningkatkan industry yang mandiri, berdaya saing, dan maju serta industry hijau;
4. Menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industry oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;



Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019

6. Meningkatkan persebaran pembangunan industry keseluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkuat ketahanan nasional;
7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan

Tahapan I (2015 – 2019) arah rencana pembangunan industry adalah untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam pada indutri hulu berbasis agro, mineral dan migas, yang diikuti dengan pembangunan industry pendukung dan andalan serta selektif melalui penyiapan SDM yang ahli dan kompeten dibidang industry, serta meningkatkan penguasaan teknologi.

Beberapa factor penghambat dan pendorong dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ditinjau dari sasaran jangka menengah renstra kementerian Perindustrian adalah sebagai berikut :

Faktor-Faktor Penghambat:

1. Lemahnya koordinasi antar kabupaten/kota Provinsi dan Pusat
2. Rendahnya kualitas SDM pengelolah Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Faktor-Faktor Pendorong:

1. Adanya Peraturan sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
2. Adanya kesempatan bagi Pengelolah Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan staf mengikuti diklat teknis.

3. Telaahan Renstra Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Tahun 2015-2019.

RPJPN 2005- 2025 menetapkan bahwa RPJMN 2015- 2019, yang merupakan RPJMN Tahap III, bertujuan untuk lebih memantapkan penataan Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Kementerian Perdagangan sebagai salah satu pelaku pembangunan perekonomian akan ikut berperan penting dalam mewujudkan daya saing ekonomi nasional.



Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019

Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan perkembangan, masalah, dan berbagai kecenderungan pembangunan perekonomian ke depan, maka VISI Kementerian Perdagangan sejalan dengan misi Pemerintah adalah:

“ Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong ”

Untuk menjembatani Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden periode 2015 – 2019 dalam melaksanakan agenda pembangunan nasional, Kementerian Perdagangan periode 2015 – 2019 memiliki 3 (tiga) misi dalam membangun sektor perdagangan yaitu :

1. Meningkatkan pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri yang berkelanjutan;
2. Meningkatkan perdagangan dalam negeri yang bertumbuh dan berkualitas; dan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di sektor perdagangan. Beberapa faktor penghambat dan pendotong dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ditinjau dari sasaran jangka menengah renstra kementerian Perdagangan

Faktor-Faktor Penghambat:

1. Lemahnya koordinasi antar kabupaten/kota Provinsi dan Pusat
2. Rendahnya kualitas SDM pengelolah Dagang Kecil dan Menengah

Faktor-Faktor Pendorong:

1. Adanya Peraturan sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
2. Adanya kesempatan bagi Dagang Kecil dan Menengah dan staf mengikuti diklat teknis.

4. Telaahan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Sulawesi Selatan

Pembangunan Sulawesi Selatan merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan RPJPD 2008-2028 Sulawesi Selatan, substansi RPJM Nasional, dinamika lingkungan strategis, aspirasi masyarakat dan



Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019

pemerintah Sulawesi Selatan, serta visi misi Gubernur/Wakil Gubernur. Visi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) Provinsi Sulawesi Selatan adalah visi bersama seluruh unit didalam organisasi yaitu :

“Menjadikan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) sebagai Pilar Utama Perekonomian Sulawesi Selatan pada Tahun 2018“.

Pilar : Dalam arti kinerja usaha yang sesuai prinsip-prinsip Koperasi dan kaidah bisnisnya.

Utama : Dalam arti Partisipasi anggotanya

Beberapa faktor penghambat dan pendorong ditinjau dari sasaran jangka menengah renstra Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

Faktor-Faktor Penghambat:

1. Alokasi anggaran pada upaya pengembangan sektoral masih minim
2. Belum terdapatnya sarana produksi yang sesuai standar
3. Penjelasan terkait dengan tataruang pengembangan wilayah belum membahas khusus tentang penempatan lokasi usaha bagi KUMKM
4. Masih banyaknya reaktor biogas yang tidak berfungsi dengan baik
5. Kurangnya pengetahuan bagi pengelola KUMKM mengenai pemanfaatan limbah biogas untuk menjadi pupuk organik
6. Belum terdapatnya regulasi yang mengatur hubungan integrative antar komoditi

Faktor-Faktor Pendorong:

1. Adanya dukungan dari daerah baik dalam bentuk penyediaan lahan dan dalam dukungan anggaran
2. Dukungan anggaran dari kementerian melalui dekonsentrasi dan tugas pembantuan
3. Komitmen pimpinan kementerian dan jajarannya
4. Adanya keselarasan antara pengembangan pertanian/sawah/palawija dengan pengembangan ternak sapi potong dan unggas



5. Adanya keselarasan antara pengembangan perkebunan dengan pengembangan ternak kecil
6. Reaktor biogas, bukan hanya dapat menghasilkan biogas, namun output stury member potensi yang sangat besar untuk produksi pupuk organik padat dan cair

5. Telaahan Rensra Dinas Perindag Provinsi Sulawesi Selatan

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, maka visi Dinas Perindag Tahun 2013-2018 yang hendak dicapai dalam tahapan pertama pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

” Sulawesi Selatan Sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan ”

Pilar Utama Pembangunan Nasional : Gambaran tentang kondisi Sulawesi Selatan pada Tahun 2018 yang menjadi acuan dan berkontribusi nyata terhadap solusi persoalan mendasar bangsa Indonesia.

Simpul Jejaring : Gambaran tentang kondisi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 yang menjadi simpul distribusi barang dan jasa.

Akselerasi Kesejahteraan : Gambaran tentang kondisi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 yang sudah mencapai fase akhir tinggal landas dan memasuki awal kematangan ekonomi.

Beberapa faktor penghambat dan pendorong ditinjau dari sasaran jangka menengah renstra Dinas Perindag Propinsi Sulawesi Selatan

Faktor-Faktor Penghambat:

1. Belum berfungsinya secara optimal system informasi yang ada sehingga tingkat layanan pada dunia usaha dalam aspek informasi teknologi industry, peluang dan tantangan pasar masih relatif rendah



Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019

2. Keserasian dan sinergitas program antara perangkat pelaksanaan masih perlu ditingkatkan dan terfokus pada komoditas unggulan
3. Masih dibutuhkan tambahan tenaga teknis dan operasional
4. Sistem pembelajaran organisasi belum berjalan secara optimal serta belum mampu mengembangkan budaya belajar dengan bekerja

Faktor-Faktor Pendorong:

2. Meningkatkan koordinasi perencanaan antara pusat, propinsi dan Kabupaten kota.
3. Mendorong dan mengembangkan infrastruktur serta penciptaan iklim usaha yang kondusif.
4. Meningkatkan kemampuan SDM para pelaku usaha
5. Meningkatkan kemampuan inovasi teknologi
6. Meningkatkan kapasitas sarana distribusi dan kemampuan logistic
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur yang mempunyai kompetensi.

D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1. Telaahan Terhadap RTRW Kabupaten Luwu Utara

a. Tujuan

Tujuan Penataan Ruang pada RTRW kabupaten Luwu Utara adalah untuk mewujudkan Kabupaten Luwu Utara yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berbasis agro dan kelautan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan aspek bencana demi terciptanya kesejahteraan masyarakat Luwu Utara.

b. Kebijakan dan Strategi

Kebijakan dan strategis penataan ruang wilayah mencakup pengembangan struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis kabupaten, meliputi :

- 1). Kebijakan Penetapan pusat-pusat kegiatan yang mencakup PPK dan PPL, dilaksanakan dengan strategi :



Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019

- a. mendukung penetapan Kota Masamba sebagai PKL sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan;
 - b. menetapkan kawasan PPK yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan; dan
 - c. menetapkan kawasan sebagai PPL yang tersebar di ibu kota kecamatan yang berfungsi untuk mendukung PPK.
- 2). Kebijakan Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang terpadu dan merata diseluruh wilayah kabupaten, dilaksanakan dengan strategi :
- a. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat;
 - b. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan daerah tertinggal; dan
 - c. meningkatkan jaringan energi dengan lebih menumbuh kembangkan pemanfaatan sumber daya yang ramah lingkungan dalam sistem kemandirian energi area mikro dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air.
- 3). Kebijakan perlindungan dan pelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan, dilaksanakan dengan strategi:
- a. menetapkan kawasan hutan lindung; dan
 - b. meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
 - c. mencegah pemanfaatan ruang di kawasan strategis nasional, propinsi maupun kabupaten yang berpotensi mengurangi daya dukung kawasan; dan
 - d. membatasi dan mencegah pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan strategis yang dapat memicu perkembangan kegiatan budidaya.



- 4). Kebijakan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan/pencemaran lingkungan hidup, dilaksanakan dengan strategi :
- a. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi sistem ekologi wilayah;
 - b. melindungi dan mengoptimalkan kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - c. melindungi dan mengoptimalkan kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
 - d. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
 - e. mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana; dan
 - f. mengelola sumber daya alam yang terbaru untuk menjamin ketersediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamnya.
- 5). Kebijakan perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya, dilaksanakan dengan strategi :
- a. menetapkan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis kabupaten untuk memanfaatkan sumber daya alam di ruang darat, laut, dan udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;



Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019

- b. mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan;
 - c. mengembangkan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek politik, pertahanan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - d. mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan kabupaten.
- 6). Kebijakan Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, dilaksanakan dengan strategi :
- a. membatasi perkembangan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
 - b. menumbuh kembangkan kawasan agropolitan, agroindustri dan minapolitan pada sentra-sentra produksi unggulan;
 - c. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% dari luas kawasan terbangun perkotaan;
 - d. Membatasi perkembangan kawasan terbangun di perkotaan untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan sekitarnya.
- 7). Kebijakan Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian kabupaten yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional, dilaksanakan dengan strategi :
- a. mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budidaya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah;
 - b. menciptakan iklim investasi yang kondusif;



Pencana Kerja Perubahan Tahun 2019

- c. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;
 - d. menjaga dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup kawasan; dan
 - e. meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi.
- 8). Kebijakan Pemanfaatan sumber daya alam dan atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dilaksanakan dengan strategi :
- a. mengembangkan kegiatan penunjang dan/atau kegiatan turunan dari pemanfaatan sumber daya dan/atau teknologi tinggi;
 - b. meningkatkan keterkaitan pemanfaatan sumber daya dan/atau teknologi tinggi dengan kegiatan penunjang dan/atau turunannya; dan
 - c. mencegah dampak negatif pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi terhadap fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat.
- 9). Kebijakan peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan Negara, dilaksanakan dengan strategi :
- a. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar asset-aset pertahanan dan keamanan
 - b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar asset-aset pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
 - c. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan kermanan negara.

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperindag ditinjau dari implikasi RTRW antara lain :

Hambatan :

1. Masih rendahnya sosialisasi RTRW dan KLHS;



Pencana Kerja Perubahan Tahun 2019

2. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya RTRW dan KLHS;
3. Rendahnya pengendalian dan pengawasan RTRW dan KLHS;
4. Tingginya pelanggaran pemanfaatan ruang dan KLHS;
5. Belum adanya penerapan sanksi terhadap pelanggaran RTRW dan KLHS;
6. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya AMDAL.

Pendorong :

1. Adanya Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang RTRW;
2. Adanya Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang RPJPD;
3. Adanya Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang RPJMD;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

E. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dari beberapa permasalahan yang ada pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Luwu Utara maka dapat dilihat dari Isu-Isu Strategis, saat ini Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah kabupaten Luwu Utara melaksanakan 4 bidang kewenangan yaitu: Bidang Koperasi dan UKM, Bidang Perdagangan, Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Barang dan Bidang Perindustrian. Beberapa isu-isu strategis yang ada pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Luwu Utara, yakni :

1. Bidang Koperasi dan UKM

- a. Masih Kurangnya pengetahuan Aparat dalam Pembinaan Koperasi dan UMKM.
- b. Masih rendahnya Kesadaran masyarakat dalam pengembangan Perkoperasian.
- c. Masih rendahnya SDM Pengurus dan Pengelola Koperasi.



Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019

- d. Belum adanya koperasi unggulan disetiap Kecamatan
- e. Lemahnya pengelolaan Manajemen bagi KSP/USP Koperasi.
- f. Kurangnya Pengetahuan Pelaku Usaha dalam menumbuh kembangkan kewirausahaan.
- g. Belum maksimalnya peralatan dan Permodalan bagi UMKM
- h. Kurangnya Pembinaan terhadap UMKM potensial.
- i. Tidak Tersedianya Data UMKM yang akurat.
- j. Masih minimnya Bantuan Modal Kerja bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- k. Kurangnya produk UMKM yang memiliki standar pasar
- l. Kurangnya Sarana dan Prasarana Pemasaran Bagi Produk UMKM.
- m. Rendahnya keinginan masyarakat untuk cinta produk lokal
- n. Belum adanya regulasi tentang layanan umum permodalan terhadap UMKM dan perusahaan daerah.
- o. Kurangnya Pembinaan Bagi UMKM Penerima Bantuan Dana Bergulir.

2. Bidang Perdagangan

- a. Terbatasnya Pelaku Usaha yang berorientasi ekspor dan memiliki kemampuan mengakses informasi pasar.
 - b. Belum optimalnya penataan dan Pengelolaan Pasar Tradisional.
 - c. Kondisi sarana dan prasarana penunjang perdagangan belum memadai untuk mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa.
 - d. Belum adanya regulasi tentang Penataan Pedagang kaki lima dan asongan.
 - e. Belum maksimalnya penataan dan pembinaan pedagang
 - f. Masih terbatasnya sarana dan prasarana perdagangan di kecamatan
 - g. Masih terbatasnya kendaraan operasional
 - h. Belum maksimalnya pemasaran produk dan komoditi unggulan.
 - i. Masih terbatasnya sarana dan prasarana resi gudang.
- i. BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN BARANG**
- a. Masih Kurangnya Pengetahuan SDM Aparat Pengawasan Barang dan Jasa.
 - b. Belum Optimalnya Lembaga Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar.



Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019

- c. Kurangnya tingkat kesadaran produsen dan konsumen tentang tertib niaga dan perlindungan konsumen.
- d. Masih adanya produk yang beredar di pasaran yang belum memenuhi persyaratan yang berlaku.
- e. Belum terbentuknya UPTD Kemetrolagian sehingga belum bisa dilakukan tera dan tera ulang sebagai sumber PAD.
- f. Belum adanya kantor UPTD kemetrolagian sebagai tempat penyimpanan peralatan tera.

4. Bidang Perindustrian

- a. Masih rendahnya kualitas Sumber daya terampil dibidang industri
- b. Masih rendahnya Pertumbuhan Wirausaha Baru di Bidang Perindustrian.
- c. Kurangnya Sarana dan Prasarana Dibidang Perindustrian.
- d. Masih Kurangnya Peralatan yang Memadai bagi Para Pelaku Usaha Industri.
- e. Masih kurangnya produk - produk IKM yang berciri khas lokal.
- f. Masih Rendah kualitas produk IKM.
- g. Masih terbatasnya produk IKM berstandarisasi
- h. Perlunya pemutakhiran Data Potensi Industri yang Akurat setiap tahun.
- i. Belum adanya industri pariwisata (Kampung Komoditi Unggulan)
- j. Belum maksimalnya kerjasama pelaku industri dengan pihak swasta
- k. Perlunya Pembinaan Bagi Industri Rumah Tangga secara berkesinambungan
- l. Perlunya Kawasan Pengembangan industri tahun tempe di Kecamatan Bone-Bone dan Kecamatan Sukamaju.
- m. Perlunya kawasan pusat perbelanjaan Meubel
- n. Pengembangan Industri Kapurung Instant

Untuk memperoleh informasi tentang apa saja yang menjadi isu strategis yang akan ditangani melalui renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab.Luwu Utara di gunakan analisis SWOT.



Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019

Analisis lingkungan internal Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Luwu Utara memperhatikan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan dan analisis lingkungan eksternal memperhatikan unsur-unsur peluang dan ancaman sebagai berikut :

a. Kekuatan (*Strength*)

1. Tersedianya perda Nomor 4 Tahun 2012 yaitu perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2008 Tentang struktur organisasi dan tata kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Luwu Utara.
2. Kuatnya komitmen dan besarnya dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi kerakyatan .
3. Adanya komitmen pimpinan yang tegas, konsisten dan didukung oleh seluruh staf.
4. Adanya dukungan peraturan sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

b. Kelemahan (*Weakness*)

1. Data potensi daerah beragam dan belum akurat/memadai
2. Kebanyakan pelaku usaha terbentur masalah permodalan
3. Belum adanya kawasan industri sebagai pusat produksi
4. Pengawasan dan Pemanfaatan teknologi informasi yang relatif masih rendah.
5. Masih banyak produk UMKM yang belum berstandarisasi
6. Belum maksimalnya penataan dan pembinaan pedagang

c. Peluang (*Opportunities*)

1. Kebijakan dan kewenangan dalam pembinaan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah



2. Kebijakan Otonomi Daerah
3. Potensi Sumber Daya Alam yang cukup besar
4. Jumlah Koperasi dan UKM cukup Banyak
5. Adanya dukungan Masyarakat luas terhadap program-program dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

d. Tantangan (Threats)

1. Kondisi Sosial ekonomi masyarakat masih rendah dan tidak stabil
2. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan koperasi masih rendah.
3. Sarana Pemasaran terhadap Produk UMKM masih Kurang.
4. Keterbatasan Modal Berusaha terhadap Pelaku Ekonomi masih kecil.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang akan direncanakan pada Renja-P tahun 2017 adalah program dan kegiatan yang belum mencapai target dan belum dilaksanakan Faktor- faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2017 adalah tetap mengacu pada :

- Visi dan Misi Luwu Utara yaitu :

Visi “ Luwu Utara yang Religius dengan Pembangunan Berkualitas dan Merata yang Berlandaskan Kearifan Lokal”

Misi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM :

1. Meningkatkan Industri kreatif yang berdaya saing tinggi
2. Meningkatkan kualitas Koperasi sebagai penopang perekonomian masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia bagi pengelola Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
4. Meningkatkan sarana Infrastruktur pengembangan kawasan industri
5. Fasilitasi pengembangan modal usaha bagi UMKM



Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019

6. Pengembangan Industri Kecil Menengah dalam rangka peningkatan ekonomi kerakyatan
7. Meningkatkan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
8. Meningkatkan nilai transaksi perdagangan dan net ekspor antar daerah.
9. Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan dan sektor industri terhadap PDRB.

Dalam Meningkatkan pertumbuhan, produktifitas dan Pengembangan potensi pusat-pusat perekonomian daerah Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM untuk tahun 2017 melakukan beberapa usulan program/kegiatan. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM untuk tahun 2017 mengusulkan program sebanyak 18 Program dan 45 kegiatan dengan rincian 6 Program rutin dan 12 Program teknis dengan 18 kegiatan rutin dan 37 kegiatan Teknis dengan Total Pagu Anggaran Sebesar Rp. 17.271.222.500,-. Program dan Kegiatan yang diusulkan sesuai dengan dokumen perencanaan yang tertuang di dalam RPJMD, Renstra, Renja-P, RKPD dan Usulan pemangku kepentingan melalui Musrenbang Desa, Kecamatan dan Kabupaten, dan Propinsi. Untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel. 5 berikut



**BAB. 1V
PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja-P) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Luwu Utara disusun sebagai Implementasi komitmen seluruh Aparatur Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM untuk mewujudkan visi dan misi yang menitikberatkan pada peningkatan Pembangunan, Peningkatan Ekonomi Kerakyatan, Pengembangan Koperasi, UKM dan IKM, Pelayanan dan Sumber Daya Manusia (SDM). Apabila dalam perjalanan terjadi perubahan situasi dan kondisi yang dapat mempengaruhi Pelaksanaan Renja-P Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM dapat ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan ataupun perubahan.

Capaian Kinerja out come Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM hingga tahun 2018 3 tahun pelaksanaan RPJMD dan Resntra 2016 s/d 2021 mencapai 80,12 % sedangkan capaian out come tahun 2019 sebesar 98,59 % dengan rata-rata kriteria capaian sangat tinggi.

Dan diharapkan pula dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya yaitu 2020 dapat mensinergikan dengan program dan kegiatan kabupaten dan stakeholder- stakeholder yang lain yang mendukung pada pembangunan di Kabupaten Luwu Utara.



Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019

Kemiskinan masih menjadi isu penting yang perlu penanganan di Kabupaten Luwu Utara, berbagai upaya dilakukan dalam menekan laju kemiskinan. Komitmen Pemerintah Kabupaten Luwu Utara memberdayakan masyarakatnya adalah salah upaya untuk bisa mengurangi angka kemiskinan yang ada diluwu Utara. Sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Luwu Utara telah menargetkan hingga tahun 2017 mendatang angka kemiskinan di Luwu Utara akan berkurang 15 persen itu berarti bahwa angka kemiskinan hingga akhir tahun 2018 \pm 13,8 % .

Dalam rangka penurunan angka kemiskinan tersebut Pemerintah Kabupaten Luwu Utara membentuk tim identifikasi upaya penanggulangan kemiskinan, serta melakukan advokasi bagaimana formulasi dalam upaya penanggulangan kemiskinan di masyarakat.

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Satuan Kerja Perangkat Daerah juga berperan sangat penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Salah satu wujud peranan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM dalam penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Luwu Utara adalah membentuk program Fasilitasi Modal Usaha Melalui KUR, Bantuan dana stimulan bagi wirausaha muda dan wanita, Pasar Murah, Bantuan peralatan bagi IKM, Pasar online dan Pemasaran Melalui retail modern, Koperasi Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir (LEPP), KUR yang berupa pemberian pinjaman modal usaha dengan bunga yang sangat rendah bahkan tanpa bunga.



Rencana Kerja Perubahan Tahun 2019

Dalam kaitan itu, maka DPRD bersama dengan masyarakat perlu memberi dukungan sepenuhnya agar program-program tersebut dapat direalisasikan secara optimal dan mencapai sasaran karena keberhasilan pelaksanaan Renja tahun 2019 sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan disiplin dari semua pihak.

Masamba, Oktober 2019
KEPALA DINAS,



Drs. H. MUH. KASKUM, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19700215 199202 1 002



Tabel 2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN LUWU UTARA

NO	TUJUAN	Sasaran	Indikator	Satuan	TARGET		REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI CAPAIAN		CATATAN ANALISA
					TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatkan Koperasi dan Usaha Mikro Yang Berdaya Saing yang Berlandaskan Kearifan Lokal	Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	Persentase Koperasi yang sehat	%	4.63	5.41	5.02	5.41	7.72	9.65	
			Persentase usaha mikro yang mengalami peningkatan Skala Usaha	%	0.31	0.45	0.32	0.46	0.5	0,75	
2	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Sektor Perdagangan	Meningkatkan Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Pertumbuhan Nilai Transaksi Perdagangan	%	2.5	2.75	2.51	2.77	3	3.25	

Tabel 1
REKAPITULASI EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN 2018 DINAS P2KUKM DAN PENCAPAIAN RENSTRA DINAS P2KUKM S/D TAHUN 2018
Kabupaten Luwu Utara

DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d 2021 (Selama periode RPJMD)		Realisasi capaian kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2017)		Realisasi Tingkat Capaian RPJMD s/d Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2018		Ket	
											I	II	III	IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11=7+8+9+10		12=11/7*100		13			
3 06 3 06 01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Layanan Publik(Jumlah Persentase Jumlah Layanan/Total Layanan*100	100	%	4,890,054,840	100	1,667,291,580	100	34	100	628,055,000	25	201,842,338	25	50,217,500	25	0	25	0	100	624,636,000	100	99.46	
3 06 3 06 01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim	12,000	pucuk	13,500,000	3,000	2,000,000	25	15	3,000	650,000	1000	150,000	1,000	150,000	1,000	150,000	0	200000	3,000	650,000	100	100	
3 06 3 06 01 01 06	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran tagihan telepon/internet	12	bin	37,668,840	12	10,199,180	100	27	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dirawat	5	unit	50,000,000	5	8,681,000	100	17	5	17,000,000	2	4,800,000	0	0	3	7,200,000	0	1,581,000	5	13,581,000	100	80	
3 06 3 06 01 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Cleaning service	1	org	121,500,000	1	31,000,000	100	26	1	12,000,000	1	4,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	0	2,000,000	1	12,000,000	100	100	
		Jumlah paket pembersih yang dibeli	23	jenis		23		100	0	23		5		10		18	0	0	0	23	0	100	-	
3 06 3 06 01 01 12	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen alat-alat listrik yang dibeli	20	jenis	65,666,000	20	15,750,000	100	24	20	6,500,000	5	3,000,000	0	0	15	3,500,000	0	0	20	6,500,000	100	100	
3 06 3 06 01 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Koran berlangganan	10	koran	96,000,000	10	28,760,000	100	30	10	9,255,000	10	3,135,000	10	1,865,000	10	4,255,000	10	0	10	9,255,000	100	100	
3 06 3 06 01 01 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	Jumlah aparat yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi	52	Pegawai	1,850,000,000	46	661,540,840	88	36	48	294,700,000	12	114,847,338	0	0	25	170,000,000	11	9,852,662	48	294,700,000	100	100	
3 06 3 06 01 01 19	Penatausahaan Keuangan, Administrasi Kepegawaian, Ketatausahaan dan Asset Daerah	Jumlah dokumen admnistrasi keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan asset	4	dok	2,655,720,000	4	909,360,560	100	34	4	287,950,000.00	1	71,910,000	1	45,202,500	1	150,000,000	1	20,837,500	4	287,950,000	100	100	

3	06	3	06	01	09	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN	Jumlah Kunjungan Dalam Pelayanan Kedinasan	100	%	800,000,000	100	155,964,700	100	19	100	61,919,700	25	29,159,700	25	8,225,000	14	23,960,000	2	575,000	100	61,919,700	100	100		
3	06	3	06	01	09	04	Kunjungan Kerja Bersama Bupati/Wakil Bupati, DPRD/Muspida/Peja bat Pemerintah Tingkat Atas/Unit kerja terkait	Jumlah pegawai yang melaksanakan kunjungan kerja	52	Pegawai	800,000,000	52	155,964,700	100	19	41	61,919,700.00	15	29,159,700	10	8,225,000	14	23,960,000	2	575,000	41	61,919,700	100	100	
3	07	3	06	01	15	PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG	Persentase Pertumbuhan UMKM	35.25	%	220,000,000	28.25	147,475,000	80	67	30	0	28.25	0	28.25	0	0	0	0	0	28	0	100	-		

3	07	3	06	01	15	04	Penyusunan Kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah	Jumlah Ranperda/Perda yang terbit	1	Ranperda	220,000,000	1	147,475,000	80	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
3	06	3	06	01	15	02	PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF UMKM	<i>Persentase SDM Koperasi dan UMKM yang dilatih</i>	17.66	%	647,540,000	16.1	98,930,000	91	15	16.75	740,882,000	16.1	0	0	25,448,987	0	0	0	0	16.1	25,448,987	96.12	3							
3	06	3	06	01	15	02	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah SDM UMKM yang dilatih	270	UMKM	342,540,000	60	98,930,000	22	29	100	740,882,000.00	0	0	0	25,448,987	100	705,332,000	0	0	100	730,780,987	16.1	99							
3	06	3	06	01	15	03	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD	Jumlah Pengurus Koperasi yang dilatih	125	Kop	305,000,000	60	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-							
3	07	3	06	01	16		PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI UMKM	<i>Persentase UMKM yang mendapatkan fasilitas dari pemerintah, BUMD dan BUMN</i>	16	%	1,295,080,500	6.89	322,996,000	43	25	10	221,808,500	7.10	19,599,500					###	221,755,000	###	100									
3	07	3	06	01	16	01	Pemantauan, Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi UMKM	Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi	17000	UMKM	318,530,500	12865	116,186,000	76	36	1500	47,148,500.00	100	8,175,000	100	3,555,001	700	15,489,999	600	19,928,500	1,500	47,148,500	100	100							
							Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UMKM	Jumlah UMKM yang difasilitasi akses pemasaran melalui E-Commerce	250	UMKM	460,000,000	0	0	-	0	30	77,710,000.00	0	0	100	50,981,000	100	3,300,000	100	23,376,000	100	77,657,000	333.3	100							
3	06	3	06	01	15	04	Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM	Jumlah Produk UMKM yang di Promosikan	100	produk	516,550,000	40	206,810,000	40	40	20	96,950,000.00	5	11,424,500	0	0	5	31,212,000	10	54,313,000	20	96,949,500	100	100							

						PENINGKATAN KUALITAS	<i>Persentase Koperasi Aktif</i>	69.5	%	793,037,500	58.69	200,042,000	84	25	64	130,059,000	58.69	29,369,500				#####	130,047,800	91.70	100						
3	07	3	06	01	16	Pembinaan, Pengawasan, dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Jumlah koperasi yang mendapatkan pembinaan	205	Kop	793,037,500	238	200,042,000	116	25	227	130,059,000.00	50	29,369,500	0	0	100	29,154,000	77	71,524,300	227	130,047,800	100	100			
								195	Kop Aktif		152		78	0	190		190		0	0	0	0	0	0	190	0	190	-			
3	07	3	06	01	16	04	PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI	<i>Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB</i>	4.89	%	801,089,300	4.57	334,435,300	93	42	4.6	82,106,000	4.57	10,393,000						4.57	82,106,000	99.35	100			
3	07	3	06	01	16	06	Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri	Jumlah IKM yang dilatih pengolahan yang berbasis pangan	252	IKM	437,325,000	152	187,471,000	60	43	50	82,106,000.00	0	10,393,000	0	0	50	50,113,000	50	21,600,000	100	82,106,000	200	100		
3	07	3	06	01	16	07	Pengembangan dan Pelayanan Tehnologi Industri	Jumlah IKM yang mendapatkan pendampingan	120	IKM	363,764,300	60	146,964,300	50	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
2	11	3	06	01	17		PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI	<i>Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri</i>	2.59	%	712,372,500	2.39	219,089,700	92	31	2.15	65,250,000	2.15	10,830,000						2.15	65,250,000	100	100			
2	11	3	06	01	17		Pengembangan Kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas	Jumlah IKM yang berstandarisasi sertifikasi halal	60	IKM	346,887,500	46	147,604,700	77	43	6	65,250,000.00	6	10,830,000	0	0	6	36,600,000	6	17,820,000	6	65,250,000	100	100		
2	11	3	06	01	17	05	Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi	Jumlah IKM yang dilatih pengolahan pasca panen	352	IKM	365,485,000	322	71,485,000	91	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
							PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	<i>Persentase Cakupan bina kelompok pengrajin = Jumlah kelompok pengrajin yang difasilitasi pemerintah dibagi jumlah kelompok pengrajin x 100 %</i>	33.47	%	3,201,363,700	25.5	773,961,250	76	24	30	120,750,000	25.5	30,646,000						#####	120,613,000	95.83	100			
2	11	3	06	01	17	06	Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Rasio IKM yang memenuhi kualifikasi untuk dibantu	58	klp IKM	2,379,676,200	29	539,673,750	50	23	1	30,000,000	0	0	0	0	1	29,950,000	0	0	1	29,950,000	100	99.83		

2	11	3	06	01	17	07	Pemberian Kemudahan Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah	Jumlah Industri yang telah didata	350	IKM	409,387,500	220	122,387,500	63	30	50	49,000,000.00	20	21,900,000	0	0	20	13,282,000	10	13,758,000	50	48,940,000	100	99.88	
2	11	3	06	01	17	09	Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah Dengan Swasta	Jumlah IKM yang bekerjasama dengan pihak swasta	50	IKM	412,300,000	20	111,900,000	40	27	10	41,750,000	2	8,746,000	0	0	5	15,595,000	3	17,382,000	10	41,723,000	100	100	
3	07	3	06	01	17		PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	50	%	1,827,024,000	25	656,507,000	50	36	30	173,200,000	25	33,131,500							30	173,200,000	100	100	
3	07	3	06	01	17	01	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan-Permasalahan Pengaduan Konsumen	Jumlah Kasus/Masalah Konsumen yang terselesaikan	25	kasus	963,750,000	10	248,415,000	40	26	5	31,400,000	2	12,653,000	1	4,845,000	2	4,070,000	1	9,832,000	6	31,400,000	120	100	
3	07	3	06	01	17	02	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Jumlah Barang kadaluarsa yang ditarik di pasaran	265	jenis	553,974,000	159	191,873,300	60	35	53	57,550,000.00	10	10,083,000	0	0	20	25,539,000	23	21,928,000	53	57,550,000	100	100	
								Persentase penurunan barang kadaluarsa	50	%		15		30	0	20		15.98		0	0	2	0	2	0	20		100	-	
								Jumlah barang bersubsidi yang diawasi	8	jenis		8		100	0	8		2				3	0	3	0	8		100	-	
3	07	3	06	01	17	03	Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrolgian Daerah	Jumlah Peralatan UTTP Kemetrolgian yang ditera	10000	unit	309,300,000	5638	216,218,700	56	70	2130	84,250,000.00	300	10,395,500	0	0	1,500	39,457,000	2,100	34,397,500	3,900	84,250,000	183.1	100	
									9	Kecamatan		9		100	0	9		2		2		3	0	0	0	9	0	100	-	
3	06	3	06	01	18	05	PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal = Jumlah pedagang yang yang mendptkan binaan Pemda tahun n dibagi jumlah kelompok pedagang	12.5	%	29,673,574,700	10.2	6,752,851,658	82	23	11.25	1,228,054,750	10.35	49,867,605		20,175,000		405,743,250		714,108,395	#####	1,189,894,250	100	97	
3	06	3	06	01	18	06	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk	Jumlah Pasar Tradisional yang dibangun	14	Pasar	28,019,774,700	8	6,169,300,358	57	22	1	783,799,250.00	0	0	0	10,000,000	1	309,164,250	1	434,575,000	1	753,739,250	100	96	

3	06	3	06	01	18	06	Pengembangan Pasar Lelang Daerah	Jumlah Pengusaha dan Kelompok Tani yang mengikuti Pasar lelang	60	poktan	301,500,000	30	101,789,000	50	34	10	217,550,000.00	3	14,796,105	2	10,175,000	3	5,489,000	2	180,189,895	10	210,650,000	100	97	
3	06	3	06	01	18	06	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data Pasar	47	Pasar	860,875,000	43	332,080,500	91	39	2	154,255,500.00	2	35,071,500	0	0	2	18,640,000	2	99,343,500	2	153,055,000	100	99	
								Jumlah Kebutuhan pokok yang didata	115	jenis		69		60	0	23		23				23	0	0	0	46	0	100	-	
								Jumlah pedagang yang terdata/dibina	10000	pedagan g		8424		84	0	2000		500				1,000	0	500	0	2,000	0	100	-	
3	06	3	06	01	18	07	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan	Jumlah Paket Pasar Murah	10000	paket	491,425,000	5892	149,681,800	59	30	2000	72,450,000.00	0	0	0	0	2,000	72,450,000	0	0	2,000	72,450,000	100	100	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM													###		35.31															
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN KEGIATAN DARI SELURUH PROGRAM (%)																											###		93	
PREDIKAT KINERJA SAMPAI TRIWULAN III																											Sangat Tinggi			

KEPALA DINAS,



Drs. H. MUH. KASRUM, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19700215 199202 1 002

Tabel 2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN LUWU UTARA

NO	TUJUAN	Sasaran	Indikator	Satuan	TARGET		REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI CAPAIAN		CATATAN ANALISA
					TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatkan Pertumbuhan, Produktifitas dan Pengembangan potensi pusat-pusat perekonomian	Meningkatnya Produktifitas Koperasi dan UMKM	Persentase koperasi aktif	%	64	66	58.69	57.92	68	69	
2			Persentase Usaha Mikro dan kecil	%	98.97	99.5	99.61	99.69	99.75	99.98	
3		Meningkatnya nilai perdagangan barang dan jasa	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	9.39	9.41	9.31*	9.32	9.45	9.48	
4			Net Ekpor antar Daerah	Rp	130,800,000	145,900,000	119.309.060*	152,200,000	165,900,250	175,900,250	
5			Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	10.5	11.25	10.71	11.28	11.55	12.17	
6			Jumlah Pasar tradisional yang dibangun	Pasar	2	2	3	1	2	2	
7		Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	%	4.6	4.62	4.57*	4.48	4.65	4.67	

8			Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri	%	2.41	2	2.39*	1.97	1.85	1.7	
9			Pertumbuhan Industri	%	11,15	11.7	7.8	11.33	12.1	13.2	
10			Cakupan bina kelompok pengrajin	%	25.5	27.5	30	25	29.5	31.5	

Catatan : * Data Sementara

KEPALA DINAS,



Drs. H. MUH. KASRUM, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19700215 199202 1 002

TABEL 3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD-P TAHUN 2019
KABUPATEN LUWU UTARA

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
3 06 3 06 01 06	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN DAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA	Tertib administrasi dan laporan tepat waktu sesuai SAP		100	%	211,541,000				100	%	259,422,600	
3 06 3 06 01 06 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Akuntabilitas dan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dibuat	Dinas P2KUKM	2	dok	67,550,500	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas P2KUKM	Jumlah Laporan Akuntabilitas dan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dibuat	2	dok	74,762,300	
3 06 3 06 01 06 06	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan yang disinkronkan	Dinas P2KUKM	8	dok	143,990,500	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Dinas P2KUKM	Jumlah dokumen Perencanaan yang disinkronkan	10	dok	184,660,300	
3 06 3 06 01 05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur		35	%	199,489,000				35	%	195,244,000	
3 06 3 06 01 05 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparat yang mengikuti Bimtek	Dinas P2KUKM	12	pegawai	199,489,000	Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab.Lutra, Prov.Sul-Sel dan Luar Prov.Sul Sel	Jumlah Bimtek yang diikuti	12	pegawai	195,244,000	
2 11 3 06 01 16	PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF UMKM	Persentase SDM Pengelola Koperasi yang dilatih		18,182	%	931,905,000				18,182	%	1,039,296,000	
		Persentase SDM Usaha Mikro Kecil yang dilatih		0.77	%					0.77	%		

1						2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12	
2	11	3	06	01	16	06	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah UMKM yang dilatih Kewirausahaan	Luwu Utara	100	UMKM	763,056,000	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah UMKM yang dilatih Kewirausahaan	Luwu Utara	100	UMKM	870,447,000	
								Jumlah UMKM yang mendapatkan dana stimulan dari pemerintah		60	UMKM			Jumlah UMKM yang mendapatkan dana stimulan dari pemerintah		60	UMKM		
2	11	3	06	01	16	07	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD	Jumlah Koperasi yang dilatih manajemen pengelolaan Koperasi	Luwu Utara	100	Kop	168,849,000	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD	Jumlah Koperasi yang dilatih manajemen pengelolaan Koperasi	Luwu Utara	100	Kop	168,849,000	
2	11	3	06	01	17		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	Persentase Koperasi bermitra dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya		21.21	%	256,864,000					21.21	%	335,092,500
								Persentase UMKM yang bermitra dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya		27.49	%						27.49	%	
2	11	3	06	01	17	04	Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah bagi Koperasi dan UMKM	Jumlah Koperasi Aktif yang mendapatkan modal usaha dari lembaga keuangan	Luwu Utara	35	Klp	39,200,000	Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah bagi Koperasi dan UMKM	Jumlah Koperasi Aktif yang mendapatkan modal usaha dari lembaga keuangan	Luwu Utara	35	Klp	62,200,000	
								Jumlah UMKM penerima KUR	Luwu Utara	3550	UMKM			Jumlah UMKM penerima KUR	Luwu Utara	3550	UMKM		
							Pengembangan Sarana Pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah produk UMKM dipasarkan ke retail Modern		77	produk	162,664,000	Pengembangan Kerjasama Kemitraan dan Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (E-Commerce)	Jumlah produk UMKM dipasarkan ke retail Modern		77	produk	204,444,000	
								Jumlah Produk UMKM yang dipasarkan melalui pasar online		50	produk			Jumlah Produk UMKM yang dipasarkan melalui pasar online		50	produk		
2	11	3	06	01	17	09	Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Perkembangan UMKM	Jumlah UMKM yang didata	Luwu Utara	12915	UMKM	55,000,000	Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Perkembangan UMKM	Jumlah UMKM yang didata	Luwu Utara	12915	UMKM	68,448,500	

1					2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
						Jumlah Barang Kadalursa yang diawasi	Luwu Utara	9	Kec			Jumlah Barang Kadalursa yang diawasi	Luwu Utara	9	Kec		
3	06	3	06	01	15	Operasionalisasi Kemetrologian Daerah	Luwu Utara	3,000	Unit	86,340,000	Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah	Jumlah Peralatan UTTP Kemetrologian yang ditera	Luwu Utara	3,000	Unit	101,340,000	
3	06	3	06	01	15	Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah	Luwu Utara	1	paket	98,161,000	Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah	Jumlah retribusi tera ulang alat UTTP	Luwu Utara	1	paket	105,258,400	
3	06	3	06	01	18	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI		12	%	8,159,768,000						8,330,069,500	
						Persentase kelompok pedagang yang dibina dan difasilitasi pemerintah		11.55	%								
						Persentase Komoditi unggulan yang dipasarkan		21.43	%								
3	06	3	06	01	18	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk	Kec. Bone-bone, Kec. Sukamaju dan Kec. Tanalilli	2	unit	7,760,229,000	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk	Jumlah Pasar Rakyat yang dibangun	Kec. Bone-bone, Kec. Sukamaju dan Kec. Tanalilli	2	unit	7,886,729,000	
3	06	3	06	01	18	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Luwu Utara	83	jenis	103,339,000	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah data barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya yang dikelola	Luwu Utara	83	jenis	100,626,000	
						Jumlah operasi pasar dan sidak sembako yang dilaksanakan	4 pasar	5	kali			Jumlah operasi pasar dan sidak sembako yang dilaksanakan	4 pasar	5	kali		
3	06	3	06	01	18	Penyelenggaraan Pasar Lelang dan Sistem Resi Gudang	Luwu Utara	10	poktan	54,500,000	Pengembangan Pasar Lelang dan Sistem Resi Gudang	Jumlah poktan yang mengikuti pasar lelang	Luwu Utara	10	poktan	47,525,000	

1						2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12	
							Jumlah Omzet UMKM	Luwu Utara	225	Miliar Rp			Jumlah Omzet UMKM	Luwu Utara	225	Miliar Rp			
2	11	3	06	01	18	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	60.89	%	180,971,000				60.89	%	263,560,500		
2	11	3	06	01	18	05	Pembinaan, Pengawasan dan Perhargaan Koperasi berprestasi	Jumlah Koperasi aktif dan berbadan hukum	Luwu Utara	165	Koperasi	180,971,000	Pembinaan, Pengawasan dan Perhargaan Koperasi berprestasi	Jumlah Koperasi aktif dan berbadan hukum	Luwu Utara	165	Koperasi	263,560,500	
									190	KopAktif					190	KopAktif			
3	07	3	06	01	17	PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI	Persentase Industri Kecil Menengah yang Berbasis Teknologi		10.24	%	148,920,000				10.24	%	148,920,000		
3	07	3	06	01	17	02	Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri	Jumlah dokumen Kajian Teknik RPIK yang dibuat	Luwu Utara	1	dokumen	148,920,000	Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri	Jumlah IKM yang didampingi pengembangan teknologi industri	Luwu Utara	1	dokumen	148,920,000	
							Jumlah Naskah akademk/Ranperda RPIK yang dibuat	Luwu Utara	1	Ranperda				Luwu Utara	1	Ranperda			
3	07	3	06	01	18	PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Industri		33	%	225,250,000	PENATAAN STRUTUR INDUSTRI			33	%	176,500,000		
3	07	3	06	01	18	02	Pemberian Bantuan Peralatan bagi Industri Kecil Menengah	Jumlah IKM yang dibantu peralatan industri	Luwu Utara	10	klp	225,250,000	Pemberian Bantuan Peralatan bagi Industri Kecil Menengah	Jumlah IKM yang dibantu peralatan industri	Luwu Utara	10	klp	176,500,000	
3	07	3	06	01	15	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI	Persentase produk IKM yang terstandarisasi		3.72	%	134,330,000				3.72	%	145,030,000		
3	07	3	06	01	15	04	Pengembangan Kapasitas Pranata Pengukuran, Standarisasi, penguian dan	Jumlah IKM yang Berstandarisasi SertifikatHalal	Luwu Utara	10	IKM	85,680,000	Pengembangan Kapasitas Pranata Pengukuran, Standarisasi, penguian dan kualitas	Jumlah IKM yang Berstandarisasi SertifikatHalal	Luwu Utara	10	IKM	81,380,000	

1				2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12		
3	07	3	06	01	15	06												
							Peningkatan Kualitas kemasan produk Industri Kecil Menengah	Jumlah IKM yang dilatih kemasan	Luwu Utara	50	org	48,650,000	Peningkatan Kualitas kemasan produk Industri Kecil Menengah	Jumlah IKM yang dilatih dan difasilitasi kemasan dari Pemerintah	Luwu Utara	50	org	63,650,000
2	07	1	15	01	16		PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL MENENGAH	Persentase Peningkatan Omzet IKM		22	%	117,747,500						117,747,500
2	07	1	15	01	16	02	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri	Jumlah IKM yang dilatih kerajinan	Luwu Utara	50	IKM	67,012,500	Kerjasama Mitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah dengan Swasta	Jumlah IKM yang Bekerjasama dengan Pihak Swasta	Luwu Utara	50	IKM	67,012,500
2	07	1	15	01	16	04	Monitoring dan Evaluasi Industri Kecil Menengah	Jumlah IKM yang tumbuh dan berkembang (Pendataan IKM)	Luwu Utara	100	IKM	50,735,000	Monitoring dan Evaluasi Industri Kecil Menengah	Jumlah IKM yang tumbuh dan berkembang (Pendataan IKM)	Luwu Utara	100	IKM	50,735,000
3	06	3	06	01	15		PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	Persentase fasilitasi Penyelesaian Pengaduan Konsumen		93.33	%	289,501,000						321,598,400
								Persentase alat UTP bertanda tera sah yang berlaku		52.87	%							
								Persentase barang kadaluarsa yang ditarik dan dimusnahkan		98.24	%							
							Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah kasus konsumen yang difasilitasi/diselesaikan	Luwu Utara	28	Kasus	35,000,000	Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah kasus konsumen yang difasilitasi/diselesaikan	Luwu Utara	28	Kasus	35,000,000
3	06	3	06	01	15	02												
3	06	3	06	01	15	03	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Jumlah barang Kadaluarsa yang ditarik dipasaran	Luwu Utara	5,100	buah	70,000,000	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Jumlah barang Kadaluarsa yang ditarik dipasaran	Luwu Utara	5,100	buah	80,000,000
								Jumlah Barang Bersubsidi yang diawasi	Luwu Utara	8	Jenis			Jumlah Barang Bersubsidi yang diawasi	Luwu Utara	8	Jenis	

1					2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12	
						Jumlah surat resi yang dikeluarkan	Luwu Utara	5	surat			Jumlah surat resi yang dikeluarkan	Luwu Utara	5	surat			
3	06	3	06	01	18	04	Penyelenggaraan Promosi Produk Dalam Negeri	Jumlah produk yang dipamerkan		20	jenis	84,200,000	Penyelenggaraan Promosi Produk Dalam Negeri	Jumlah produk yang dipamerkan		20	jenis	137,689,500
						Jumlah pameran yang diikuti		5	kali			Jumlah pameran yang diikuti		5	kali			
3	06	3	06	01	20	05	Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat	Jumlah pedagang penerima fasilitasi usaha perdagangan UMKM disektor perdagangan	Luwu Utara	1442	pdg	85,500,000	Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat	Jumlah pedagang penerima fasilitasi usaha perdagangan UMKM disektor perdagangan	Luwu Utara	1442	pdg	85,500,000
3	06	3	06	01	18	06	Penyelenggaraan Pasar Murah Daerah	Jumlah paket Pasar Murah yang tersalur kepada masyarakat prasejahtera	9 kec.	3500	Paket	72,000,000	Pasar Murah	Jumlah paket Pasar Murah yang tersalur kepada masyarakat prasejahtera	9 kec.	3500	Paket	72,000,000
					JUMLAH					10,631,036,500						11,332,481,000		

KEPALA DINAS,



Drs. H. MUH.KASRUM, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19700215 199202 1 002

Tabel 4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2019
KABUPATEN LUWU UTARA

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	URAIAN	LOKASI	BESARAN VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH				
1	Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah bagi Koperasi dan UMKM	Bantuan Pemodalan Usaha Kecil Menengah	Desa Sidomukti Kec. Bone-Bone	5 klp	
		Bantuan Usaha	Kel. Salassa Kec. Baebunta	2 klp	
		Bantuan Modal Usaha bagi UKM	Desa Karondang Kec. Tanalili	2 klp	
2	PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI				
1	Pemberian Bantuan Peralatan bagi Industri Kecil Menengah	Peralatan pembuatan makanan tradisional Dange	Desa Takkalala Malangke	1 paket	
		Peralatan pembuatan makanan tradisional Dange	Desa Welawi Malangke Barat	1 paket	
		Peralatan Pertukangan Kayu	Desa Lapapa Kec. Masamba	1 paket	
		Peralatan Pertukangan Kayu	Desa Pandak Kec. Masamba	1 paket	
		Peralatan Pertukangan Kayu	Mappedeceng	1 paket	
		Peralatan Pertukangan Kayu	Dusun Sapu Rasa Kec. Mpd	1 paket	
		Peralatan cetak batako	Masamba	1 paket	
		Peralatan menjahit	Kel. Kappuna Masamba	1 paket	
		Peralatan Pertukangan Kayu	Desa Tandung Kec. Malbar	1 paket	
		Peralatan Pertukangan Kayu	Desa Welawi Malangke Barat	1 paket	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	URAIAN	LOKASI	BESARAN VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
3	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI				
1	Pembinaan,Pengawasan dan Penghargaan	Pembentukan Koperasi (Desa Benteng Kec. Mappdcg)		1 Klp	
	Koperasi Berprestasi	Pembentukan Koperasi (Desa Sumberdadi Kec. Tanalili)		1 Klp	
4	PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA PERDAGANGAN DALAM NEGERI				
1	Pengembangan pasar dan distribusi barang/ produk	Pasar Tradisional Ds. Bungapati Kec. Tanalili	Jumlah Pasar Tradisional yang terbangun	1 unit	
		Lanjutan Pembangunan Pasar Tradisional Bone-Bone Desa Patoloan		1 Unit	
		Rehab Pasar Sabbang		1 paket	
		Penimbunan pasar Bone-Bone		1 paket	
5	PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI				
1	Pembinaan kemampuan teknologi Industri	Pelatihan Home Industri	Desa Bone Subur Kec. Sabbang	1 paket	

TABEL 5
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN LUWU UTARA

SKPD : DINAS P2KUKM

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana-P Tahun 2019				CATATAN PENTING	2020			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				5	6				9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
3 06 3 06 01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100	%	765,231,500			100	%	784,010,000
3 06 3 06 01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim	Dinas P2KUKM	3000	Surat	1,000,000	APBD		3000	Surat	1,000,000
3 06 3 06 01 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas /operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua yang dirawat	Dinas P2KUKM	1	unit	17,000,000	APBD		1	unit	17,000,000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat yang dirawat	Dinas P2KUKM	2	unit				2	unit	
3 06 3 06 01 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah cleaning service	Dinas P2KUKM	1	org	12,600,000	APBD		1	org	12,000,000
3 06 3 06 01 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen alat-alat listrik yang dibeli	Dinas P2KUKM	15	Jenis	6,541,500	APBD		20	Jenis	8,250,000
3 06 3 06 01 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah koran berlangganan	Dinas P2KUKM	8	koran	10,490,000	APBD		8	koran	12,760,000

1						2	3	4	5		6	7	8	9		10		
3	06		3	06	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Luar Daerah Dalam Propinsi dan Luar Propinsi	48	peg	350,000,000	APBD		48	peg	350,000,000
3	06		3	06	01	01	19	Penatausahaan Keuangan, Administrasi Kepegawaian, Ketatausahaan dan Asset Daerah	Belanja ATK, Cetak Penggandaan dan honor pengelola keuangan Kepegawaian dan Asset	Dinas P2KUKM	100	%	367,600,000	APBD		100	%	383,000,000
3	06		3	06	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRSARANA APARATUR	Meningkatnya Pelayanan Kepegawaian		100	%	141,816,500			100	%	137,382,500
3	06		3	06	01	02	09	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang dibeli	Dinas P2KUKM	AC 1 unit, Printer 4 unit, 1 unit, Deskbook 2 unit, kipas angin 4 unit, Wireless 1 unit, televisi 1 bh, roterboard 1 pkt, akses point 1 pkt, DVR Recorder CCTV 1 pkt, kamera CCTV 1 pkt	unit	59,216,000	APBD		AC 1 unit, Printer 4 unit, 1 unit, Deskbook 2 unit, kipas angin 4 unit, Wireless 1 unit, televisi 1 bh, roterboard 1 pkt, akses point 1 pkt, DVR Recorder CCTV 1 pkt, kamera CCTV 1 pkt	unit	67,300,000
3	06		3	06	01	02	09	Pengadaan Meubeler	Jumlah Kursi eselon IV yang diadakan, Jumlah kursi rapat yang diadakan, meja kerja yang diadakan	Dinas P2KUKM	2, 5, 2	buah	9,050,000	APBD		2, 5, 2	buah	11,850,000
3	06		3	06	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah bahan kebersihan kantor yang dibeli	Dinas P2KUKM	24	jenis	13,118,000	APBD		24	jenis	13,000,000
									Jumlah Gedung Kantor yang dirawat		1	unit						
3	06		3	06	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dirawat	Dinas P2KUKM	2	unit	45,000,000	APBD		2	unit	30,000,000

1							2	3	4	5		6	7	8	9		10
								Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dirawat		2	unit				2	unit	
3	06	3	06	01	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dirawat	Dinas P2KUKM	18	unit	15,432,500	APBD		18	unit	15,232,500
3	06	3	06	01	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur		40	%	195,244,000			40	%	199,489,000
3	06	3	06	01	05	03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparat yang mengikuti Bimtek	Dinas P2KUKM	12	pegawai	195,244,000	APBD		12	pegawai	199,489,000
3	06	3	06	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tertib administrasi dan laporan tepat waktu sesuai SAP		100	%	259,422,600			100	%	211,541,000
3	06	3	06	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dok Sakip yang dilaporkan	Dinas P2KUKM	1	dok	74,762,300	APBD		1	dok	67,550,500
								Jumlah dok LPPD yang dilaporkan		1	dok			1	dok		
3	06	3	06	01	06	06	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen Renja Pokok yang dilaporkan	Dinas P2KUKM	1	dok	184,660,300	APBD		1	dok	143,990,500
								Jumlah Dokumen KUAPPS yang dilaporkan		1	dok			1	dok		

1						2	3	4	5		6	7	8	9		10
							Jumlah Dokumen Renja Perubahan yang dilaporkan		1	dok				1	dok	
							Jumlah Dokumen Renstra yang Dilaporkan dan disinkronkan		1	dok				1	dok	
							Jumlah Dokumen Monev yang dilaporkan		1	dok				1	dok	
							Jumlah Dokumen Musrenbang yang dilaporkan		1	dok				1	dok	
							Jumlah Dokumen RPJMD yang disinkronkan		1	dok				1	dok	
							Jumlah Dokumen RKPD Kabupaten yang disinkronkan		1	dok				1	dok	
3	07	3	06	01	15	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI	Persentase produk IKM yang terstandarisasi		3.86	%	145,030,000			3.86	%	134,330,000
3	07	3	06	01	15	04	Pengembangan Kapasitas Pranata Pengukuran, Standarisasi, pengujian dan kualitas	Jumlah IKM yang Berstandarisasi SertifikatHalal	Luwu Utara	10	IKM	81,380,000	APBD	10	IKM	85,680,000
							Peningkatan Kualitas kemasan produk Industri Kecil Menengah	Jumlah IKM yang dilatih dan difasilitasi kemasan dari Pemerintah	Luwu Utara	50	orang	63,650,000	APBD	50	orang	48,650,000
3	06	3	06	01	15	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN BARANG	Persentase fasilitas Penyelesaian Pengaduan Konsumen		93.33	%	321,598,400			95.56	%	289,501,000

1						2	3	4	5		6	7	8	9		10	
							Persentase alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku		52.87	%							
							Persentase barang kadaluarsa yang ditarik dan dimusnahkan		98.24	%							
3	06	3	06	01	15	02	Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah kasus konsumen yang difasilitasi/diselesaikan	Luwu Utara	28	Kasus	35,000,000	APBD		28	Kasus	35,000,000
3	06	3	06	01	15	03	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa		Luwu Utara	5,100	BH	80,000,000	APBD		5,100	BH	70,000,000
3	06	3	06	01	15	05	Operasional Kemetrolgian Daerah		Luwu Utara	3,000	Unit	101,340,000	APBD		3,000	Unit	86,340,000
3	06	3	06	01	15	06	Pengembangan UPT Kemetrolgian Daerah		Luwu Utara	1	Paket	105,258,400	APBD		1	Paket	98,161,000
3	07	3	06	01	16		PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL MENENGAH	Persentase Peningkatan Omzet IKM		25	%	117,747,500			25	%	117,747,500
3	07	3	06	01	16	02	Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri	Jumlah IKM yang tumbuh dan berkembang (Pendataan IKM)	Luwu Utara	50	IKM	67,012,500	APBD		50	IKM	67,012,500

1						2	3	4	5		6	7	8	9		10	
3	07	3	06	01	16	07	Monitoring dan Evaluasi Industri Kecil Menengah	Jumlah IKM yang tumbuh dan berkembang (Pendataan IKM)	Luwu Utara	100	IKM	50,735,000	APBD		100	IKM	50,735,000
2	11	3	06	01	16		PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF UMKM	Persentase SDM Pengelola Koperasi yang dilatih		21.05		931,905,000			21.05		931,905,000
								Persentase SDM Usaha Mikro Kecil yang dilatih		0.77					0.77		
2	11	3	06	01	16	06	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah UMKM yang dilatih Kewirausahaan	Luwu Utara	60	UMKM	763,056,000	APBD		60	UMKM	763,056,000
2	11	3	06	01	16	07	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD	Jumlah Koperasi yang dilatih manajemen pengelolaan Koperasi	Luwu Utara	100	Kop	168,849,000	APBD		100	Kop	168,849,000
2	11	3	06	01	17		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	Persentase Koperasi bermitra dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya		23.39	%	335,092,500			23.39	%	256,864,000
								Persentase UMKM yang bermitra dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya		27.69	%				27.69	%	
2	11	3	06	01	17	04	Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah bagi Koperasi dan UMKM	Jumlah Koperasi Aktif yang mendapatkan modal usaha dari lembaga keuangan	Luwu Utara	35	Kop	62,200,000	APBD		35	Kop	39,200,000

1						2	3	4	5		6	7	8	9		10	
2	11	3	06	01	17	06	Pengembangan sarana pemasaran produk usaha mikro kecil menengah	Jumlah UMKM penerima KUR	Luwu Utara	1	Paket	204,444,000	APBD		1	Paket	162,664,000
2	11	3	06	01	17	11	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	Jumlah UMKM yang didata	Luwu Utara	12915	UMKM	68,448,500	APBD		12915	UMKM	55,000,000
3	07	3	06	01	17		PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI	Persentase Industri Kecil Menengah yang Berbasis Teknologi		10.34	%	148,920,000			10.34	%	148,920,000
3	07	3	06	01	17	02	Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri	Jumlah IKM yang didampingi pengembangan teknologi industri	Luwu Utara	1	Doc	148,920,000	APBD		1	Doc	148,920,000
3	07	3	06	01	18		PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Industri		50	%	176,500,000			50	%	225,250,000
3	07	3	06	01	18	02	Pemberian Bantuan Peralatan bagi Industri Kecil Menengah	Jumlah Kelompok yang dibantu peralatan industri	Luwu Utara	10	Klp	176,500,000	APBD		10	Klp	225,250,000
3	06	3	06	01	19		PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Persentase Penurunan Inflasi		2.36	%	8,330,069,500			2.36	%	8,159,768,000
3	06	3	06	01	18	03	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	Jumlah data barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya yang dikelola	Luwu Utara	2	Pasar	7,886,729,000	APBD		2	Pasar	7,760,229,000
3	06	3	06	01	18	06	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Jumlah operasi pasar dan sidak sembako yang dilaksanakan	Luwu Utara	83	Janis	100,626,000	APBD		83	Janis	103,339,000
3	06	3	06	01	18	09	Penyelenggaraan pasar lelang dan sistem resi gudang	Jumlah paket Pasar Murah yang tersalur kepada masyarakat prasejahtera	Luwu Utara	10	Poktan	47,525,000	APBD		10	Poktan	54,500,000

1						2	3	4	5		6	7	8	9		10	
3	06	3	06	01	18	10	Penyelenggaraan promosi Produk dalam negeri		Luwu Utara	20	Produk	137,689,500	APBD		20	Produk	84,200,000
3	06	3	06	01	18	11	Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat		Luwu Utara	1442	Pedgang	85,500,000	APBD		1442	Pedgang	85,500,000
3	06	3	06	01	18	13	Penyelenggaraan Pasar Murah Daerah		Luwu Utara	3500	Paket	72,000,000	APBD		3500	Paket	72,000,000
2	11	3	06	01	18		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	61.73	%	263,560,500			61.73	%	180,971,000
2	11	3	06	01	18	05	Pembinaan, Pengawasan dan Perhargaan Koperasi berprestasi	Jumlah Koperasi aktif dan berbadan hukum	Luwu Utara	165	Koperasi	263,560,500	APBD		165	Koperasi	180,971,000
							JUMLAH					12,132,138,000					12,132,138,000

KEPALA DINAS,



Drs. H. MUH. KASRUM, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19700215 199202 1 002

		Meningkatkan Perlindungan Terhadap Hak/Kepentingan Konsumen dan Tertib Ukur	Persentase Peningkatan Perlindungan Konsumen	%	80.24		80.3	80.68	81.48	89.48	
3	Meningkatkan Peran Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam Perekonomian Daerah	Meningkatkan Daya Saing dan Produktifitas Industri Kecil Menengah	Pertumbuhan Industri	%	11.15	11.70	7.8	11.33	12.10	13.20	

Catatan : * Data Sementara

KEPALA DINAS,

Drs. H. MUH. KASRUM, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19700215 199202 1 002